



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN UMUM

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK ANGOLA

TENTANG

KERJASAMA EKONOMI, ILMIAH, TEKNIK DAN KEBUDAYAAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Angola, selanjutnya secara terpisah disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

Berkeinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara untuk membangun kerja sama dalam bidang ekonomi, ilmiah, teknik dan kebudayaan antara kedua negara yang berdasarkan pada prinsip saling menghargai dan menaati prinsip-prinsip dan standar hukum internasional yang berlaku;

Mengetahui bahwa kerja sama antara kedua negara bertujuan untuk menjamin kemaslahatan bersama dalam pembangunan sosial - ekonomi rakyat dan negaranya;

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

Menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
(TUJUAN)

Persetujuan Umum (Persetujuan) ini bertujuan untuk membangun dan memajukan kerja sama dalam bidang ekonomi, ilmiah, teknik dan kebudayaan, serta upaya saling dukung yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan keuntungan timbal balik.

PASAL 2
(AREA KERJA SAMA)

Dalam ruang lingkup kerja sama ekonomi dan teknik, antara lain, Para Pihak sepakat memprioritaskan kerja sama sebagai berikut:

- a. Energi dan Air
- b. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- c. Pertanian
- d. Minyak, Gas dan Mineral
- e. Perdagangan dan Investasi
- f. Budaya dan Pariwisata
- g. Kesehatan dan Pendidikan
- h. Usaha Kecil dan Menengah
- i. Area-area kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak

PASAL 3
(BENTUK KERJA SAMA)

Kerja sama antara Para Pihak mencakup berbagai area seperti tertuang dalam Pasal 2 Persetujuan ini dan terutama dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pertukaran informasi ilmiah dan pengalaman-pengalaman teknis;
- b. Pertukaran tenaga ahli atau konsultan dalam berbagai bidang terkait ekonomi dan teknologi;

- c. Pertukaran beasiswa dan pelatihan personel di institusi pendidikan publik kedua negara;
- d. Pelatihan magang dan spesialisasi profesi dan kegiatan penelitian, pembangunan ekonomi dan sosial;
- e. Melaksanakan studi dan dokumentasi teknis bagi rancangan sosial dan ekonomi baru di negara Para Pihak;
- f. Bentuk-bentuk kerja sama lainnya yang disepakati Para Pihak;

PASAL 4 (KERAHASIAAN)

Para Pihak tidak diperkenankan memberikan informasi atau dokumen apapun pada pihak ketiga yang dibuat dalam kerangka Persetujuan ini tanpa persetujuan tertulis yang disepakati Para Pihak.

PASAL 5 (PERTUKARAN TENAGA AHLI)

Pengiriman tenaga ahli, konsultan, dan staf oleh salah satu Pihak dalam kerangka Persetujuan ini harus sesuai dengan program kerja yang disepakati bersama antara otoritas yang berwenang Para Pihak.

PASAL 6 (PEMBATASAN)

1. Setiap orang yang melakukan kegiatan di bawah wewenang dari salah satu Pihak dan berkegiatan di wilayah Pihak lainnya, yang dilakukan dalam kerangka Persetujuan ini atau perjanjian, protokol, kontrak lainnya, atau program terpisah yang dibentuk dalam kerangka Persetujuan ini, harus membatasi kegiatannya sesuai dengan kerangka yang dibentuk dalam Persetujuan ini atau perjanjian, protokol, kontrak lainnya atau program terpisah di dalam wilayah masing-masing dan agar menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara penerima;

2. Pelanggaran perundang-undangan dan peraturan dapat berakibat dicabutnya hak individu-individu yang terlibat serta pengakhiran program.

PASAL 7
(OTORITAS BERWENANG)

1. Bagi keperluan Perjanjian ini, Pemerintah Indonesia menunjuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Angola menunjuk Kementerian Hubungan Eksternal Republik Angola.
2. Setiap Pihak dapat menunjuk institusi lainnya sebagai otoritas berwenang untuk menggantikan institusi yang tersebut dalam Pasal 7 ayat 1.

PASAL 8
(PELAKSANAAN PERSETUJUAN)

1. Pelaksanaan dan pemberlakuan kegiatan ekonomi, ilmiah, kebudayaan dan teknik di bawah Persetujuan ini harus berada di bawah perjanjian, protokol atau program terpisah yang dilaksanakan oleh otoritas berwenang terkait dari Para Pihak.
2. Instrumen hukum terpisah yang dibuat di bawah Persetujuan ini harus mencantumkan secara jelas tujuan, kesepakatan pembiayaan dan aspek-aspek khusus lainnya mengenai proyek dan para personel yang terlibat.
3. Di masing-masing bidang kerja sama, para tenaga ahli dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga badan pemerintah dan institusi dari negara ketiga, dapat berpartisipasi atas undangan Para Pihak, dalam berbagai program yang akan dilaksanakan dalam kerangka Persetujuan ini.
4. Keterlibatan pihak ketiga harus disepakati sebelumnya antara Para Pihak.

PASAL 9
(KEKAYAAN INTELEKTUAL)

1. Setiap Pihak wajib menghormati setiap kekayaan intelektual yang dibawa oleh Pihak lainnya untuk pelaksanaan setiap kegiatan berdasarkan Persetujuan ini, sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan nasional yang berlaku bagi Para Pihak, serta komitmen internasional mereka.
2. Para Pihak setuju bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini akan dimiliki bersama oleh Para Pihak, sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan nasional yang berlaku bagi Para Pihak, serta komitmen internasional mereka.
3. Penggunaan kekayaan intelektual tersebut wajib berlaku berdasarkan pengaturan terpisah antara Para Pihak, sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan nasional yang berlaku bagi Para Pihak, serta komitmen internasional mereka.

PASAL 10
**(PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIKA, PENGETAHUAN TRADISIONAL,
DAN EKSPRESI BUDAYA)**

1. Para Pihak wajib mengakui keberadaan dan membantu perlindungan sumber genetica, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya.
2. Para Pihak sepakat bahwa hak kekayaan intelektual yang timbul dari penggunaan sumber-sumber daya genetica, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya dalam pelaksanaan Persetujuan ini, akan berdasarkan hukum di wilayah masing-masing Para Pihak.
3. Penggunaan sumber-sumber daya genetica, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya Para Pihak dalam pelaksanaan Persetujuan ini dilakukan melalui Persetujuan khusus yang dibuat oleh Para pihak.

PASAL 11
(KOMISI BILATERAL)

1. Para Pihak, melalui Persetujuan ini, wajib memutuskan untuk membentuk sebuah Komisi Bilateral, yang terdiri dari perwakilan kedua Pihak yang kewenangannya ditentukan oleh perjanjian terpisah, dan akan diketuai bersama oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Hubungan Eksternal Republik Angola.
2. Komisi Bilateral dapat mempekerjakan personel dari institusi pemerintah terkait lainnya dan dapat mendelegasikan kewenangan pada Komisi Khusus atau "Ad Hoc", atau Kelompok Kerja dan Komisi lainnya yang terdiri dari para tenaga ahli.

PASAL 12
(FUNGSI KOMISI BILATERAL)

Komisi Bilateral memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkaji perkembangan hubungan ekonomi bilateral
- b. Merumuskan, mendorong, dan memantau program kerja sama antara berbagai Pihak dalam bidang tertentu, sebagaimana tercantum dalam Persetujuan
- c. Mengevaluasi dan mengubah, jika dipandang perlu, keputusan terdahulu
- d. Mengkaji program-program pertukaran dan kerja sama dan modalitas pelaksanaannya.
- e. Mengusulkan area-area kerja sama baru.
- f. Mendorong entitas khusus dan institusi bisnis untuk menjajaki pelaksanaan proyek-proyek di berbagai bidang kerja sama ekonomi, ilmiah, teknik dan kebudayaan.

PASAL 13
(KEPUTUSAN KOMISI)

Pada setiap akhir periode, Komisi Bilateral akan mengadopsi sebuah dokumen yang akan ditandatangani oleh Ketua Bersama Komisi Bilateral.

PASAL 14
(PENYELESAIAN SENGKETA)

Setiap sengketa atau perbedaan yang timbul dari interpretasi dan pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak.

PASAL 15
(AMANDEMEN)

1. Persetujuan ini dapat diamandemen melalui kesepakatan Para Pihak.
2. Amandemen tersebut mulai berlaku pada tanggal yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL 16
(PENGAKHIRAN)

1. Setiap Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Pengakhiran Persetujuan wajib berlaku enam (6) bulan sejak penerimaan pemberitahuan.
2. Pengakhiran Persetujuan ini tidak berdampak pada penyelesaian proyek atau program yang telah disetujui sebelumnya selama berlakunya Persetujuan, kecuali Para Pihak menyepakati hal lain.

PASAL 17
(PEMBERLAKUAN DAN MASA BERLAKU)

Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir yang menginformasikan selesainya prosedur internal masing-masing Pihak. Persetujuan ini berlaku selama lima (5) tahun dan diperpanjang secara otomatis

untuk periode waktu yang sama, kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini melalui saluran diplomatik setidaknya enam (6) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.

Sebagai bukti, yang diberikan wewenang oleh masing-masing Pemerintahnya, menandatangani Persetujuan ini.

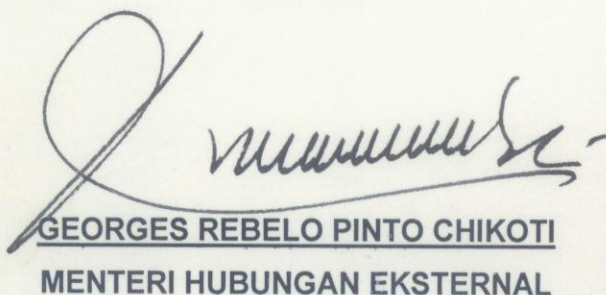
Ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 11 April 2017, dalam dua rangkap masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Portugis, dan Inggris. Semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi, naskah Bahasa Inggris akan berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



RETNO L. P. MARSUDI
MENTERI LUAR NEGERI

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK ANGOLA**



GEORGES REBELO PINTO CHIKOTI
MENTERI HUBUNGAN EKSTERNAL



REPUBLIK INDONESIA

ACORDO GERAL DE COOPERAÇÃO
ENTRE
O GOVERNO DA REPÚBLICA DA INDONÉSIA
E
O GOVERNO DA REPÚBLICA DE ANGOLA
NO DOMÍNIO ECONÓMICO, CIENTÍFICO, TÉCNICO E CULTURA

O Governo da República da Indonésia e o Governo da República de Angola adiante individualmente designados como “a Parte” e colectivamente como “as Partes”;

Desejosos em estreitar as relações de amizade e cooperação entre os dois Países e estabelecer uma cooperação nos domínios económico, científico, técnica e cultural entre os dois Países, baseada no respeito mútuo e observância dos princípios das leis internacionais;

Conscientes de que a cooperação entre os dois Países trará benefícios mútuos ao desenvolvimento sócio-económico aos respectivos Povos e Países;

De acordo a legislação nos respectivos Países;

Acordam o seguinte:

Artigo 1º
(OBJECTO)

O presente Acordo Geral (Acordo) tem por objecto estabelecer e promover a cooperação nos domínios económico, científico, técnico e cultural, bem como promover a assistência mútua na base dos princípios da igualdade e reciprocidade de vantagens.

Artigo 2º
(ÁREAS DE COOPERAÇÃO)

No interesse da cooperação económica e técnica, entre outras, as Partes definiram como prioritárias as seguintes áreas:

- a) Energia e Águas;
- b) Ciência e Tecnologia;
- c) Agricultura;
- d) Petróleo, Gás e Minerais;
- e) Comércio e Investimento;
- f) Cultura e Turismo;
- g) Saúde e Educação;
- h) Pequenos e Médios Negócios;
- i) Quaisquer outras áreas de cooperação a serem acordadas pelas Partes.

Artigo 3º
(FORMAS DE COOPERAÇÃO)

A cooperação entre as Partes deve cobrir as áreas constantes do Artigo 2.º e deve ser desenvolvida da forma seguinte:

- a) Troca de experiências nos domínios técnico e científico;
- b) Interação entre especialistas ou consultores em vários campos económicos e tecnológicos;
- c) Troca de bolsas de estudo para a formação de pessoal nas instituições públicas dos dois Países;
- d) Bolsas internas para a formação profissional e especialização e actividades de pesquisa de desenvolvimento económico e social;
- e) Elaborar estudos e documentos técnicos para novos projectos económicos e sociais nos Países das Partes;
- f) Outras formas de cooperação a serem acordadas entre as Partes.

Artigo 4º
(CONFIDENCIALIDADE)

As Partes não devem fornecer a terceiros informações e documentos resultantes do presente Acordo sem o consentimento escrito mútuo.

Artigo 5º
(TROCA DE ESPECIALISTAS)

As autoridades competentes das Partes devem elaborar programas de troca de especialistas, consultores e demais pessoal de apoio no âmbito do presente Acordo.

ARTIGO 6º
(RESTRICÇÕES)

1. Todas as pessoas que estejam no território da outra Parte sob a responsabilidade das autoridades de uma das Partes no âmbito do presente Acordo ou outros acordos, protocolos, contratos ou programas à parte concluídos com base no presente Acordo devem restringir a sua actividade e acção apenas no quadro estabelecido pelo presente Acordo ou qualquer outro acordo, protocolo, contrato ou um programa à parte, dentro do referido território e conformar-se às leis do País hóspede.
2. Qualquer violação das leis e regulamentos pode resultar na revogação da autorização das pessoas envolvidas, bem como o termo do programa.

ARTIGO 7º
(AUTORIDADES COMPETENTES)

1. Pelo propósito do presente Acordo, o Governo da República da Indonésia designa o seu Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Governo da República de Angola designa o seu Ministério das Relações Exteriores.
2. Cada uma das Partes pode designar uma outra entidade como competente autoridade para substituir as citadas no nr.1 do Artigo 7.º.

ARTIGO 8º
(IMPLEMENTAÇÃO DO ACORDO)

1. A implementação e a duração dos projectos económicos, científicos, técnicos e culturais no âmbito do presente Acordo, devem estar sujeitos a acordos, protocolos ou programas específicos à parte, a serem executados pelas autoridades competentes das Partes.
2. Os instrumentos legais específicos no âmbito do presente Acordo devem definir em particular os objectivos e os pormenores financeiros acordados dos projectos e o pessoal envolvido.
3. Dentro de cada área de cooperação, especialistas em ciência e tecnologia, bem como agências e instituições de terceiros países podem ser convidados a participar na implementação de programas nas áreas de cooperação definidos pelo presente Acordo.
4. A participação de terceiros será objecto de um acordo prévio entre as Partes.

ARTIGO 9º
(PROPRIEDADE INTELECTUAL)

1. Ambas as partes devem respeitar qualquer propriedade intelectual aplicada pela outra Parte na implementação de qualquer actividade no âmbito do presente Acordo, de acordo com a legislação e os regulamentos nacionais, em benefício das Partes e das suas comunidades.
2. As Partes acordam que qualquer propriedade intelectual resultante da implementação do presente Acordo pertencerá às Partes de acordo com as legislações e regulamentos nacionais e dos compromissos internacionais assumidos por cada uma das Partes.
3. O uso das referidas propriedades intelectuais deverá estar sujeita a entendimentos à parte entre as Partes de acordo com a legislação e os regulamentos das Partes e dos compromissos internacionais assumidos por cada uma das Partes.

ARTIGO 10º
**(PROTECÇÃO DOS RECURSOS GENÉTICOS, CONHECIMENTOS
TRADICIONAIS E FOLCLORE)**

1. As Partes devem reconhecer a existência e promover a protecção dos recursos genéticos, os conhecimentos e folclore tradicionais.
2. As Partes acordam qualquer direito de propriedade intelectual resultante do uso dos recursos genéticos, os conhecimentos e folclore tradicionais na implementação do presente Acordo deverá estar sujeito a lei do respectivo território das Partes.

3. O uso dos recursos genéticos e os conhecimentos e folclore tradicionais das Partes na implementação do presente Acordo deve estar sujeito a um acordo específico entre as Partes.

ARTIGO 11º
(COMISSÃO BILATERAL)

1. As Partes, no âmbito do presente Acordo, decidem estabelecer uma Comissão Bilateral composta por representantes de ambas as Partes cujas competências serão definidas por um acordo específico e será co-presidida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Indonésia e o Ministro das Relações Exteriores da República de Angola.
2. Podem integrar a Comissão Bilateral oficiais de outras instituições governamentais das Partes e pode-se estabelecer e delegar responsabilidades a um comité especial ou "ad hoc" ou grupos de trabalho ou comités constituídos por especialistas.

ARTIGO 12º
(FUNÇÕES DA COMISSÃO BILATERAL)

A Comissão Bilateral terá as seguintes atribuições:

- a) Avaliar o desenvolvimento das relações económicas bilaterais;
- b) Definir, dirigir e acompanhar o programa de cooperação entre as Partes contratantes nas áreas específicas, previsto no presente Acordo;

- c) Avaliar e alterar, se necessário, decisões acordadas previamente;
- d) Rever as alterações dos programas de cooperação bem como as modalidades da sua implementação;
- e) Propor novas áreas de cooperação; e
- f) Encorajar entidades e instituições económicas a explorar a possibilidade de implementar projectos nas várias áreas da cooperação económica, científica, técnica e cultural.

Artigo 13º
(DECISÕES DA COMISSÃO BILATERAL)

No final de cada sessão, a Comissão Bilateral aprova um documento que deve ser assinado pelos co-Presidentes da Comissão Bilateral.

Artigo 14º
(INTERPRETAÇÃO E DISPUTAS)

Quaisquer disputas ou diferenças resultantes da interpretação do presente Acordo deverá ser resolvido de forma amigável por intermédio de consultas e negociação entre as Partes.

Artigo 15º
(EMENDAS)

1. O presente Acordo poderá ser emendado por consenso das Partes.
2. Tais emendas deverão entrar em vigor na data acordada pelas Partes.

Artigo 16º
(DENÚNCIA)

1. Cada uma das Partes pode denunciar o presente acordo a qualquer momento devendo notificar por escrito à outra Parte através dos canais diplomáticos, com efeitos seis (6) meses após a entrega e a recepção da notificação.
2. A denúncia do presente Acordo não deverá afectar a conclusão dos projectos ou programas acordados durante a vigência do acordo, a menos que as Partes acordem em contrário.

Artigo 17º
(ENTRADA EM VIGOR E VALIDADE)

O presente Acordo entra em vigor na data da recepção da última notificação escrita a informar o cumprimento dos procedimentos internos de cada uma das Partes.

O presente Acordo é válido por um período de cinco (5) anos e é automaticamente renovado por igual período, se nenhuma das Partes denuncia pelos canais diplomáticos com uma antecedência de seis (6) meses.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários devidamente autorizados pelos respectivos Governos assinam o presente Acordo.

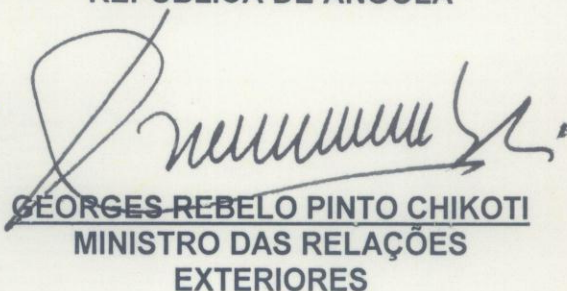
Feito em Jakarta, aos 11 Dias do Mês de Abril de 2017, em três exemplares originais, nas línguas indonésia, portuguesa e inglesa, todos igualmente autênticos. Em caso de divergência de interpretação, a versão inglesa prevalecerá.

**PELO GOVERNO DA
REPÚBLICA DE INDONÉSIA**



RETNO L. P. MARSUDI
**MINISTRA DOS NEGÓCIOS
ESTRANGEIROS**

**PELO GOVERNO
REPÚBLICA DE ANGOLA**



GEORGES REBELO PINTO CHIKOTI
**MINISTRO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES**



REPUBLIK INDONESIA

GENERAL AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ANGOLA
ON
ECONOMIC, SCIENTIFIC, TECHNICAL AND CULTURAL COOPERATION

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Angola, hereinafter individually referred to as the "Party" and collectively as the "Parties";

Desiring to strengthen the friendly relations and cooperation between the two countries to establish cooperation in the economic, scientific, technical and cultural fields between the two countries based on mutual respect and observance of the principles and internationally accepted standards of law;

Aware that cooperation between the two countries aims to ensure mutual benefits in socio-economic development of their peoples and countries;

In accordance with current legislation in their countries;

Agree the following:

ARTICLE 1
(OBJECTIVE)

The present General Agreement (Agreement) aims to establish and promote cooperation in the economic, scientific, technical and cultural fields, as well as promote mutual assistance on the basis of principles of equality and reciprocal advantage.

ARTICLE 2
(AREAS OF COOPERATION)

In the scope of economic and technical cooperation, among others, the Parties define as a priority, the following areas:

- a. Energy and Water
- b. Science and Technology
- c. Agriculture
- d. Oil, Gas and Minerals
- e. Trade and Investment
- f. Culture and Tourism
- g. Health and Education
- h. Small and Medium Business
- i. Any other areas of cooperation mutually agreed by the Parties.

ARTICLE 3
(FORMS OF COOPERATION)

The cooperation between the Parties shall cover the areas envisaged in Article 2, and shall be mainly developed as follows:

- a. Exchange of scientific and technical experiences
- b. Exchange of experts or consultants in various fields of economy and technology

- c. Scholarship exchange and personnel training in public education institutions of the two countries
- d. Internship training and professional specialization and research activities, economic and social development
- e. Conduct studies and technical documentation for new economic and social projects in the countries of the Parties
- f. Another form of cooperation mutually agreed between the Parties

**ARTICLE 4
(CONFIDENTIALITY)**

The Parties shall not disclose to third party any information or documents obtained under this Agreement without mutual written consent of the Parties.

**ARTICLE 5
(EXCHANGE OF EXPERTS)**

Dispatch of experts, consultants and all staff by one of the Parties under this Agreement shall be governed by a work program to be concluded between competent authorities of the Parties.

**ARTICLE 6
(RESTRICTIONS)**

1. All individuality acting under the authority of one Party in the territory of the other Party under this Agreement or other agreement, protocol, contract or separate program concluded under this instrument should restrict their activities and actions within the framework established under this Agreement or any other agreement, protocol, contract, or a separate program within their territory and to conform to the laws in force in the host country.

2. Any violation of the laws and regulations may result in the revocation of the licenses of individuals involved as well as the termination of the program.

ARTICLE 7
(COMPETENT AUTHORITY)

1. For the purpose of the present Agreement, the Government of the Republic of Indonesia designates its Ministry of Foreign Affairs and the Government of the Republic of Angola designates its Ministry of External Relations.
2. Each party may designate another entity as the competent authority to replace those referred to in Article 7 (1).

ARTICLE 8
(AGREEMENT IMPLEMENTATION)

1. The implementation and enforcement of economic, scientific, cultural and technical projects under the present Agreement shall be subject to agreement, protocols or separate programs to be executed by the competent authorities of the Parties.
2. The separate legal instruments under this Agreement shall specify in particular the objectives, financial understanding and other specific aspects of the projects, and the personnel involved.
3. Within each area of cooperation, experts in science and technology, as well as government agencies and institutions of third countries may participate at the invitation of the Parties, on the program to be implemented under the present Agreement.
4. Third parties shall be subject to prior agreement between the Parties.

ARTICLE 9
(INTELLECTUAL PROPERTY)

1. Each Party shall respect any intellectual property brought by the other Party for the implementation of any activities under this Agreement, in accordance with the national legislations and regulations in force of the Parties, and their international commitments.
2. The Parties agree that any intellectual property arising from the implementation of this Agreement shall be jointly owned by the Parties, in accordance with the national legislations and regulations in force of the Parties, and their international commitments.
3. The use of such intellectual property shall be subject to separate arrangements between the Parties, in accordance with the national legislations and regulations in force of the Parties and their international commitments.

ARTICLE 10
**(PROTECTION OF GENETIC RESOURCES, TRADITIONAL KNOWLEDGE
AND FOLKLORE)**

1. The Parties shall recognize the existence and the effective promotion of the protection of genetic resources, traditional knowledge and folklore.
2. The Parties agree that any intellectual property rights arising from the use of genetic resources, traditional knowledge and folklore, in the implementation of the present Agreement shall be subject to law in the respective territories of the Parties.

3. Use of genetic resources, traditional knowledge and folklore of the Parties in the implementation of this Agreement shall be effected through specific agreement to be concluded between the Parties.

ARTICLE 11
(BILATERAL COMMISSION)

1. The Parties shall, through this Agreement, decide to establish a bilateral commission composed of representatives of both Parties whose powers shall be defined by specific agreement, and will be co-chaired by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Minister for External Relations of the Republic of Angola.
2. The bilateral commission may integrate officers from other government institutions of the Parties and may establish and delegate responsibilities to Special Standing Committee or "Ad Hoc" or Working Groups and Committees constituted by experts.

ARTICLE 12
(BILATERAL COMMISSION FUNCTIONS)

The bilateral commission shall have the following functions:

- a. To review the development of bilateral economic relations
- b. To define, drive and follow the program of cooperation between the contracting parties in specific areas, as provided in this agreement
- c. To evaluate and change, if necessary previously agreed decisions
- d. To review exchange programs and cooperation as well as the modalities for its implementation, and
- e. To propose new areas of cooperation.
- f. Shall encourage special entities and business institutions to explore the possibilities of implementing projects in various areas of economic, scientific, technical and cultural cooperation.

ARTICLE 13
(COMMISSION DECISIONS)

At the end of each session, the bilateral commission will adopt a document that shall be signed by the co-Chairs of the bilateral commission.

ARTICLE 14
(SETTLEMENT OF DISPUTE)

Any disputes or differences that emerge from the interpretation and implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultation and negotiation between the Parties.

ARTICLE 15
(AMENDMENT)

1. This Agreement may be amended by consensus of the Parties.
2. Such amendments shall enter into force on the date agreed upon between the Parties.

ARTICLE 16
(TERMINATION)

1. Either Party may terminate this Agreement at any time by sending written notification to the other Party through diplomatic channels. The termination shall take effect six (6) months after its receipt.
2. The termination of this Agreement shall not affect the completion of projects or programs already agreed during its validity, unless the Parties agreed differently.

ARTICLE 17
(ENTRY INTO FORCE AND DURATION)

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification to inform about the accomplishment of the internal procedures of each Party. This Agreement is valid for a period of five (5) years and is automatically extended for equal successive periods, unless either Party notifies in writing of its intention to terminate this Agreement through diplomatic channel at least six (6) months prior to the date of its expiry.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Government, have signed this Agreement.

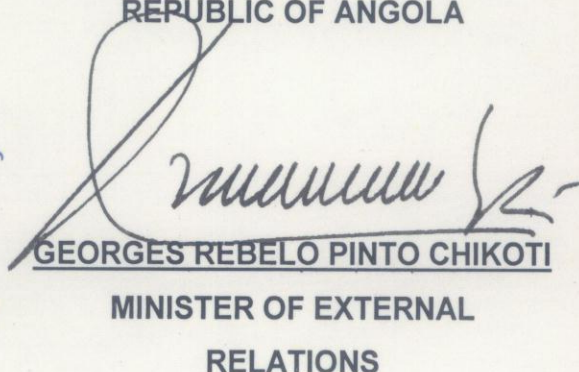
Signed in Jakarta, on 11 April 2017, in duplicates, each in Indonesian, Portuguese, and English language. All texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**



RETNO L. P. MARSUDI
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF ANGOLA**



GEORGES REBELO PINTO CHIKOTI
**MINISTER OF EXTERNAL
RELATIONS**

**ARTICLE 17
(ENTRY INTO FORCE AND DURATION)**

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification to inform about the accomplishment of the internal procedures of each Party. This Agreement is valid for a period of five (5) years and is automatically extended for equal successive periods, unless either Party notifies in writing of its intention to terminate this Agreement through diplomatic channel at least six (6) months prior to the date of its expiry.

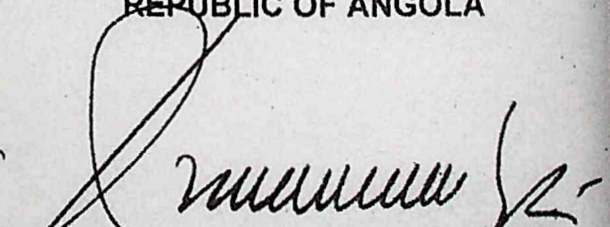
In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Government, have signed this Agreement.

Signed in Jakarta, on 11 April 2017, in duplicates, each in Indonesian, Portuguese, and English language. All texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**



RETNO L. P. MARSUDI
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF ANGOLA**


GEORGES REBELO PINTO CHIKOTI
**MINISTER OF EXTERNAL
RELATIONS**

Salinan naskah resmi
Certified true copy
Nomor : 0037/CTC/02/2021/52
Number




Sahadatun Donatirin
NIP. 19740603 199803 2 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Date